

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Povinsi Aceh merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa daerah. Dimana setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain dan dalam setiap suku memiliki norma sosial yang mengikat masyarakat didalamnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan dalam mempengaruhi sikap seorang pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan.

penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang sedang berkembang, terus berupaya melakukan pembangunan disegala sektor, baik pembangunan fisik maupun mental guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus tercapainya suatu tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maupun kemakmuran yang adil dan merata tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, bahasa, golongan maupun latar belakang sosial lainnya. Walaupun negara Indonesia negara demokrasi yang selalu menjunjung bhinneka tunggal ika, akan tetapi masih ada budaya dalam masyarakat bahkan dalam pemerintahan yang yang memiliki sikap primordialisme sebagaimana terlihat pada penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

Isu primordialisme sangat kental digunakan oleh beberapa pegawai penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Camat Terangun Kabupaten Gayo Lues. Primordialisme merupakan suatu istilah yang mengarah kepada suatu ikatan yang terjalin di dalam suatu masyarakat yang bersifat keaslian, sebagai contoh seperti

kesukuan, kekerabatan, keagamaan, dan juga kelompok, atau juga dapat berasal dari sifat yang dibawa oleh setiap individu sejak lahir. Biasanya sifat-sifat yang dimiliki tersebut akan bersifat tradisional.

Secara umum, primordialisme merupakan suatu pandangan yang memegang teguh segala hal yang memang sudah dibawa oleh setiap individu sejak lahir, baik itu tradisi, suku, budaya, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang telah ada dan menetap di dalam lingkungan pertama individu tersebut. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan terdapat berbagai kemungkinan yang terjadi, diantaranya kecenderungan untuk membentuk kelompok berdasarkan latar belakang atau asalnya, prinsip merasa budaya sendiri lebih baik, sikap tidak mau bertoleransi dengan budaya lain dan lain sebagainya (Sinaga, 2014).

Primordial akan berubah menjadi suatu primordialisme apabila sikap penyelenggaraan pemerintahan di dalam masyarakat lebih berorientasi terhadap kepentingan masyarakat banyak dibanding kepentingan diri sendiri. Kondisi tersebut yang nantinya mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan kepada suatu sikap dimana kepentingan masyarakat banyak lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadinya sendiri. Akan tetapi jika sikap penyelenggaraan pemerintahan lebih berorientasi kepada diri sendiri, kekerabatan, kelompok, keagamaan, dan suku maka akan terjadi ketidakteraturan dalam masyarakat.

Robuskha dan Shepsie dalam Wangsanegara (2006) menilai primordialisme merupakan loyalitas yang berlebihan terhadap budaya subnasional, di antaranya suku bangsa, agama, ras, kedaerahan, dan keluarga. Di satu sisi, sikap primordialisme memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya.

Namun, di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kaca mata budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah daging dan sangatlah susah untuk berubah dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan bagi dirinya.

Namun dalam konsep lokal tentang primordialisme dalam asyarakat merupakan suatu perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial berupa nilai, norma dan kebiasaan yang bersumber dari etni, ras, tradisi dan kebudayaan yang dibawa sejak individu dilahirkan. Primordialisme sangat mempengaruhi sikap perilaku seseorang dalam kehidupan sosial dan primordialisme juga dapat menyebabkan seseorang menjunjung tinggi hasil dari kebudayaannya dan memiliki rasa kesetiaan tinggi pula, apa bila tidak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok yang lain maka sikap primordialisme akan dapat memicu konflik sosial yang tentunya dapat memecah belah kerukunan antar kelompok.

Penelitian ini difokuskan pada primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Kantor Camat Terangun Kabupaten Gayo Lues. Pegawai Kantor Camat Terangun tersebut berasal dari suku, daerah, budaya, keluarga, dan latar belakang sosial yang berbeda. Setiap pegawai sudah pasti memiliki tingkat primordialisme yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan akan terlihat

sikapnya yang berbeda pula. Kemudian ditambah lagi budaya primordialisme dalam masyarakat yang beragram.

Primordialisme dalam masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues terbentuk melalui proses sejarah, dan juga melalui sosiologis, sehingga itu menguat dalam asumsi masyarakat di daerah tersebut. Seperti halnya dengan penyelenggara pemerintahan, faktor suku dan daerah asal menjadi sesuatu bagian yang diyakini karena mungkin dikarenakan suku Gayo asli tersebut dianggap pantas karena lebih tua, atau karena suku Gayo asli yang lebih banyak masyarakatnya, sehingga diluar suku Gayo seperti masyarakat pendatang dianggap kelompok yang marginal, kecil atau teralienasi.

Sikap primordialisme masyarakat Gayo asli khususnya di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues sangat kental dengan budaya setempat. Sebagian besar masyarakat memiliki persepsi bahwa suku mereka lebih baik dari suku masyarakat pendatang, daerah mereka lebih bagus daerah lainnya, ras mereka lebih tinggi dari ras orang lain, dan kebutuhan mereka lebih penting dari kebutuhan orang lain. Sikap primordialisme yang sudah membudaya dalam masyarakat tersebut akan berpengaruh besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

Salah satu budaya perilaku primordialisme yang terbentuk dalam masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues merupakan kebiasaan persepsi masyarakat tentang kepemimpinan dan pegawai penyelenggaraan pemerintahan lainnya. Meski tidak ada orang atau kelompok yang memicu menguatnya budaya perilaku primordialisme, namun nampaknya hal ini masih menguat pada setiap

lapisan masyarakat di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues baik dari primordialisme agama, primordialisme suku, dan dari segi primordialisme lainnya.

Primordialisme di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues merupakan suatu paham atau ide dari anggota masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk membentuk kelompok. Pengelompokan itu tidak hanya pembentukan suku saja, tetapi juga di bidang lain, misalnya pengelompokan berdasarkan ideologi agama dan kepercayaan. Primordialisme dalam aspek sosiologi digunakan untuk mendeskripsikan adanya ikatan-ikatan yang dimiliki seseorang dalam kehidupan sosial dengan hal-hal yang dibawa sejak awal kelahirannya.

Perimordialisme di Kecamatan Trangun Kabupaten Gayo Lues merupakan suatu sikap yang melekat pada masyarakat sehingga menguatnya tentang primordialisme marga atau keluarga dari anggota masyarakat sehingga yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah hanya dalam lingkungan atau kelompoknya sendiri dalam arti lain hanya kelompok keluarga dan kerabat dekatnya yang mengisi pememerintahan dan terjadilah ketimpangan pelayanan masyarakat antara masyarakat yang tidak ada hubungan keluarga dengan yg lainnya.

Faktor penyebab atau fakta tentang terjadinya primordialisme ini enggak terjadi begitu saja akan tetapi ada beberapa penyebab terjadinya primordialisme antara lain: adanya sesuatu yang dianggap istimewa dalam suatu kelompok seperti budaya dan suku adanya suatu sikap yang mempertahankan keutuhan suatu kelompok dari ancaman luar dan sebagian besar masyarakat memiliki pemikiran

bahwa suku mera lebih baik dari pada suku masyarakat pendatang nah disini akan terjadi ketimpangan antara yang menjabat sebagai pemimpin akan melakukan hal yang mengatas namakan kekeluargaan maksudnya dalam perekrutan staf pegawai dikantor camat maupun didalam pelayanan.

Sikap primordialisme tidak dianjurkan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena itu merupakan salah satu penghambat kemajuan pembangunan di daerah tersebut. Namun berdasarkan observasi awal pada Kantor Camat Terangun dan masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 19 Agustus 2023 dan 22 Agustus 2023 terlihat fenomena bahwa; (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih terjadi ketimpangan pelayanan kepada masyarakat antara masyarakat penduduk asli dengan masyarakat pendatang; (2) Sering muncul sikap primordialisme dari beberapa pegawai Kantor Camat Terangun yang mengutamakan kelompok, individu, daerah, atau suku tertentu dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan; (3) Masih menguat pada setiap lapisan masyarakat primordialisme agama, suku, ras, daerah asal, kelompok, dan primordialisme lainnya; dan (4) Banyak masyarakat tertentu yang masih mengansumsi bahwa suku mereka lebih baik dari suku lain, daerah mereka lebih bagus daerah lainya, ras mereka lebih tinggi dari ras orang lain, dan kebutuhan mereka lebih penting dari kebutuhan orang lain sehingga pihak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Terangun harus mengutamakan kelompok tertentu dalam segala hal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Primordialisme Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah primordialisme muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues?
2. Apa dampak primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues?

1.3 Fokus Penelitian

Agar memperoleh gambaran yang jelas dan tepat sasaran dan terhindar dalam memahami isi proposal ini dibatasi pada:

1. Munculnya primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dengan mengkaji primordialisme suku dan primordialisme kedaerahan.
2. Dampak primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dengan mengkaji primordialisme dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan terjadi diskriminasi pada kelompok-kelompok tertentu.

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan munculnya primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.
2. Mengetahui dan menjelaskan dampak primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Sebagai pengembangan ilmu teori politik, khususnya untuk para mahasiswa ilmu politik mengenai primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang, terutama yang relevan dengan penelitian ini.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah tentang primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Sebagai bahan masukan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat, dan pembaca terkait primordialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.